

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**ENY KUSUMAWATI**  
**NIM. 1405026034**

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**A. Turmudi, SH., M. Ag**  
Jl. Madukoro II No. F.27 Perum Sukoharjo Indah (PSI)  
Sukoharjo Margorejo Pati

**Singgih Muheramtohadhi, S. Sos. I., MEI**  
Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdri. Eny Kusumawati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang.

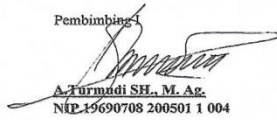
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Eny Kusumawati  
Nomor Induk : 1405026034  
Judul : Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pernerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamuataikum Wr. Wb*

Pembimbing I  
  
**A. Turmudi SH., M. Ag.**  
NIP. 19690708 200501 1 004

Semarang, 30 November 2018  
Perabimbing II

  
**Singgih Muheramtohadhi S.Sos. MEI**  
NIP. 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

I. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Eny Kusumawati  
NIM : 1405026034  
Judul : Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk  
Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus  
Kabupaten Pati)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 09 Januari 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., A.Kt.CA., CPAI

Penguji I

Ida Nur Laili, M.Ag.

Pembimbing I

A. Darmudi SH., M. Ag.  
NIP.19690708 200501 1 004

Semarang, 09 Januari 2019

Sekretaris Sidang

A. Darmudi SH., M. Ag.

Penguji II

Prof. Dr/Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.

Pembimbing II

Singgih Mulyerantohadi S.Sos. MEI  
NIP. 19821031 201503 1 003

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ : 9)*

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Juhari dan Ibu Suyati yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnya serta ridhonya demi kelancaran studi penulis di UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas doa kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan.
2. Adikku Imam Safaat, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersamamu. Walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan.

#### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)" benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 03 Desember 2018.



Eny Kusumawati

NIM. 1405026034



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### **PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

#### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

#### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

#### C. Diftong

أَي = ay

وُ = aw

D. Syaddah ( ّ )

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda tasydid misal الطَّبّ = *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya الحمدون = *al-hamidun*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.



## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang biasa dihadapi oleh negara berkembang, tidak terkecuali Negara Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati serta bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi PKH yang diukur melalui indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Seluruh indikator tersebut terpenuhi. Namun, PKH Desa Soko memang belum merata. Dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat miskin di Desa Soko dan terbatasnya kuota dari pemerintah untuk Desa Soko. Program Keluarga Harapan (PKH) cukup mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Soko, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa sudah terpenuhi. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, dalam implementasinya PKH sudah diterapkan secara bertanggung jawab dan sebagai sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Namun prinsip keadilan belum terpenuhi, karena PKH belum merata untuk masyarakat Desa Soko.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan berbagai fasilitas yang memadai.
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta wakil-wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ahmad Furqon LC., MA., H selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Turmudzi selaku Pembimbing I dan Bapak Singgih selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
6. Para narasumber penelitian yang telah rela meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi melalui wawancara penelitian yaitu Mbak Dina Sri Utami, Ibu Lilik Sudarwati, Ibu Misnamar, Ibu Maryati, Ibu Suyati, Ibu Sri Yatin, Ibu Uyun Rosida, Ibu Sulastri dan Ibu Suharni.
7. Orang tua penulis, Bapak Juhari dan Ibu Suyati yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, semangat dan doa yang tiada terputus selama penulis menempuh pendidikan.
8. Orang tua kedua penulis, Bapak Thariq Abdul Ghaffar dan Ibu Yogyasatyati serta kakak tercinta Dr. Diana Aqmala, dan Mbak Ica yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk kelancaran penulis menempuh pendidikan.
9. Adik penulis, Imam Safa'at yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Sahabat seperjuangan yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yaitu Vivi Liana, Dzurriyatun Nafi'ah, Siti Mudrikah, Vicky Iffah, Fuad Shofi Anam, Thomy Hilmi Azizy, Chusni Mubarak, Ulil Albab, M. An'im Jalal, dan M. Nadhiful Labib.
11. Teman-teman kelas EIB'14 yang banyak memberikan motivasi demi terselesaikannya pendidikan.
12. Seluruh keluarga besar ForSHEI yang selalu mendukung penulis.
13. Sahabat BMC Universitas Islam Negeri Walisongo angkatan 2014 yang telah mendukung penulis menempuh pendidikan.

14. Sahabat-sahabat yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan, yaitu Siti Kaulifah Andarwatic, Annikmah Eka Susanti, Rahayu Indriyani, Kak Diah, Kak Tika, Istifadatul Laili, Siti Nurhadiyanti dan Mbak Rifka.
15. Teman-teman private number room yang selalu mendukung penulis menyelesaikan pendidikan yaitu Mbak Heni, Mbak Kumay, Yatul, Hesti, Mega dan Mbak Laras.
16. Teman-teman kos an-nur yang pernah tinggal bersama selama 4 tahun ini yaitu Su'udah, Mbak Ayu, Mbak Etik, dan yang lain.
17. Keluarga besar KKN 69 Posko 15 (Sumberejo) yang dipimpin oleh Kordes Muflih Ramadhan Lumi beserta anggotanya.
18. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, bantuan dan doanya agar studi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi islam dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya pada bidang yang sama. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian pada bidang ini masih penulis harapkan.

Semarang, 30 November 2018

Penulis

**Eny Kusumawati**  
NIM. 1405026034

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penelitian .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Program Keluarga Harapan (PKH) .....	25
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) .....	25
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	27
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	31
4. Perkembangan Jumlah KPM PKH .....	32

5. Hak dan Kewajiban KPM PKH .....	33
6. Penyaluran Bantuan .....	36
7. Pelaksanaan PKH .....	38
8. Pendampingan PKH .....	40
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat .....	42
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	42
2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat .....	46
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	47
4. Kesejahteraan dalam Islam .....	52
C. Kemiskinan .....	59
1. Pengertian Kemiskinan .....	59
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan .....	61
3. Penyebab Kemiskinan .....	62
4. Kemiskinan dalam Islam .....	65
5. Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia .....	70

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Soko .....	74
1. Profil Umum Kabupaten Demak .....	74
a) Kondisi Geografis .....	74
b) Lembaga Pemerintahan .....	75
c) Kondisi Iklim .....	76
d) Kondisi Geologi dan Morfologi .....	76
e) Kondisi Kependudukan .....	77
B. Kondisi Masyarakat Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	81
C. PKH di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	84

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten
--

Pati .....	93
B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	115
C. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	125

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131
C. Penutup .....	131

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin .....	4
Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah KPM PKH .....	32
Tabel 2.2 Tabel Ketentuan Penghentian Bantuan .....	35
Tabel 2.3 Besaran Bantuan PKH .....	37
Tabel 3.1 Data Kepegawaian Desa Soko .....	75
Tabel 3.2 Kondisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin.....	77
Tabel 3.3 Kondisi kependudukan berdasarkan komposisi umur .....	78
Tabel 3.4 Kondisi kependudukan berdasarkan mata Pencaharian (Bagi usia 10 tahun keatas) .....	79
Tabel 3.5 Kondisi kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan.....	80
Tabel 3.6 Data sarana peribadatan Desa Soko .....	83
Tabel 3.7 Data Penerima PKH Desa Soko .....	85
Tabel 4.1 Data Penerima PKH Desa Soko .....	59
Tabel 4.2 Data Perkembangan KPM dari 2013-2017 .....	98
Tabel 4.3 Besaran Bantuan PKH .....	103
Tabel 4.4 Nama warga yang layak mendapat PKH .....	113



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Tahapan/Siklus Penyaluran .....	38
Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan PKH .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Pendamping PKH, Kepala Desa dan KPM.
- Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara.
- Lampiran 3. Dokumentasi.
- Lampiran 4. Surat Penelitian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Seringkali pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi yang telah diadakan mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan segi-segi emosional dan perasaan yang diselimuti oleh aspek-aspek moral dan kemanusiaan, atau juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pengertian mengenai hakikat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibatnya adalah berbagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan menjadi bersifat sebagian-sebagian atau tidak menemui sarannya secara tepat.<sup>2</sup>

Kemiskinan juga merupakan pangkal munculnya berbagai masalah sosial. Para ahli telah merumuskan berbagai teori dalam menanggulangi kemiskinan. Di antaranya ada dua teori yang paling menonjol, bahkan telah menjadi mazhab mapan yang dielaborasi dari pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang seksama tentang berbagai dimensi kemiskinan. Kedua teori tersebut adalah “teori kemiskinan” dan teori “kelas”. Teori pertama adalah teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu, sedangkan teori kedua adalah teori yang mengarah kepada struktur sosial.<sup>3</sup>

Dalam perspektif syariah, penyebab perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Karena itu Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN Maliki Press, 2011, h. 13.

<sup>2</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993, h. xi.

<sup>3</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang : Lentera Hati, 2012, h. 7.

berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

Selain itu, Islam bahkan menjadikan orang fakir yang memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Adapun lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain: (1) ilmu para ulama, (2) pemerintah yang adil, (3) kedermawanan kelompok orang-orang kaya, (4) doanya orang-orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka mereka termasuk sebagai para pendusta agama (QS. 107 :1-3).<sup>5</sup>

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya : (1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim (3) dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Yang juga sangat menarik adalah fakta ajaran Islam yang mengaitkan antara rukhsah (keringanan karena tidak melakukan kewajiban utama) dan pelanggaran syariat dalam Islam, dengan memberi makan dan pakaian kepada mereka yang tidak mampu.

---

<sup>4</sup> Irvan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 70.

<sup>5</sup> Irvan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 71.

Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS, beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin<sup>6</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Tahun Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Juta)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (persen)</b>
2013	248,8	28,55	11,47
2014	252,2	27,73	10,96
2015	255,5	28,51	11,13
2016	258,7	27,76	10,70
2017	262,6	26,58	10,12

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut *big five*, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016*, (On-line) tersedia di: [https://www.bps.go.id/website/brs\\_ind/brsInd-20160718115446.pdf](https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160718115446.pdf), (diakses pada, Senin, 2 Juli 2018)

terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan sosial.<sup>7</sup>

Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Perjuangan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin harus ditangani dengan tiga strategi yang diawali dengan tiga pertanyaan mendasar sebagai berikut: *Pertama*, sejauh mana masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan lima pilar utama kesejahteraan diatur. *Kedua*, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan asasi manusia yang berkenaan dengan lima pilar utama kesejahteraan sosial terpenuhi dengan baik dan merata. *Ketiga*, sejauh mana kesempatan kaum dhuafa untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas, bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Sementara itu, pemerintah yang tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasi rakyat miskin berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan sosial dengan baik dan merata adalah pemerintah yang korup, zalim dan tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kepekaan sosial dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat miskin. Mereka adalah para pejabat feodal yang lebih mengedepankan hak-hak sosial mereka yang istimewa daripada kewajiban asasi mereka terhadap rakyat. Singkatnya, mentalitas pejabat yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah para pejabat yang memosisikan dirinya sebagai kelompok elite yang berada di puncak piramida sosial yang harus dilayani oleh rakyat dan senantiasa dalam posisi siap menerima upeti dari para bawahannya yang melayani kebutuhan asasi rakyat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 4.

<sup>8</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 4-5.

<sup>9</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 6.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini dilakukan oleh negara-negara berkembang perlu dievaluasi secara kritis, baik yang berkiblat pada pandangan kritis kaum sosialis maupun yang berkiblat pada pandangan kaum liberalis-kapitalis. Kedua paradigma pembangunan kesejahteraan sosial tersebut secara kasat mata belum membawa umat manusia kepada kesejahteraan yang sejatinya, lahir batin. Sebaliknya, pembangunan sosial yang berbasis pada paradigma kapitalis, yang bertumpu pada kepentingan para pemilik modal, menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan berbagai kerusakan lingkungan ekologi manusia yang menyangkut tata ruang, penggunaan sumber-sumber kekayaan alam, air, minyak, dan gas bumi. Kekayaan alam Indonesia yang dikelola dengan paradigma kapitalis tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negeri yang kaya dengan sumber-sumber daya alam, seperti Indonesia, masih bergumul dengan masalah meningkatnya angka pengangguran dan jumlah orang miskin, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan ancaman serius yang menyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini sudah sama dengan kondisi yang dilukiskan dalam al-qur'an.<sup>10</sup>

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ  
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ



*“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki (sumber kekayaan alamnya) datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat (darat dan laut), tetapi (penduduknya) yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, (dengan korupsi, kebohongan publik, dan tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan), karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat” (QS. an-Nahl :112).*

Indonesia sendiri telah melakukan program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah, individu maupun

<sup>10</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 12.

masyarakat. Seperti program pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kaum miskin telah dilaksanakan dalam program-program nasional sejak akhir tahun 60-an. Selama dua dekade pembangunan berbagai program anti kemiskinan telah diciptakan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Prioritas utama pemerintah ditujukan kepada pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan itu berbagai program anti kemiskinan telah diciptakan, mulai dari program bantuan pemberian modal kerja bagi kelompok miskin sampai dengan program transmigrasi yang bertujuan memberi lahan bagi mereka yang tidak memiliki lahan. Kemudian untuk meratakan pembangunan antar daerah pemerintah menciptakan berbagai program inpres yang menyediakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat memperlancar upaya pemberian pelayanan dasar bagi kelompok miskin di daerah pedesaan. Melalui program inpres ini telah dibangun ribuan sekolahan dan puskesmas yang pada saat ini telah dapat melayani kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi jutaan rakyat di Indonesia.<sup>11</sup>

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia

---

<sup>11</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 30.

dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.<sup>12</sup>

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *centre of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH yang mewajibkan RTM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.<sup>13</sup> Dengan adanya PKH di Desa Soko yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Desa Soko yang selama ini menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin. Atas dasar permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

---

<sup>12</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementerian Sosial RI, 2017, h. 1.

<sup>13</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 1.



2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?
3. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan kepada dua wilayah yang berbeda, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi islam.
  2. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.
- b. Manfaat Praktis
  1. Bagi pemerintah, diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan

peran pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di masyarakat.

2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) mendorong beberapa orang melakukan penelitian terhadap hal tersebut pada masa lalu. Agar terhindar dari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian Kartiawati yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)” menjelaskan bahwa belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/mengentaskan kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai.<sup>14</sup>
2. Penelitian Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto dan Carmia Diahloka yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” menjelaskan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik sampai sekarang ini serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat

---

<sup>14</sup> Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)” *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 107.

baik khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan anak rumah tangga sangat miskin.<sup>15</sup>

3. Penelitian Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)” telah disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di Desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun 2007 dan menurun dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.<sup>16</sup>
4. Penelitian Kadek Dina Indriani yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015” mengungkapkan bahwa ketepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan khususnya dalam dimensi kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa sudah tepat sasaran dengan hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Buleleng tahun 2011-2015 yang menunjukkan hasil 14.364 yang dikategorikan cukup baik terutama hasil dalam bidang pendidikan dan kesehatan yakni 4.980 dan 3.762 dengan keadaan peserta program keluarga harapan berdasarkan besaran bantuan, tingkat usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pekerjaan dan kepadatan masyarakat yang masih dikategorikan kurang, maka dari itu pemberian dana Program

---

<sup>15</sup> Yudid B.S.Tlonaen dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 3, Nomor 1, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2014, h. 36.

<sup>16</sup> Dyah Ayu Virgoreta, dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, Nomor 12, Universitas Brawijaya, 2014, h. 4.

Keluarga Harapan dalam dimensi kesehatan dan pendidikan sudah tepat sasaran, yang nantinya diharapkan jumlah penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dapat berkurang tiap tahunnya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Buleleng mampu memberi kontribusi yang serius dan signifikan dalam upaya membantu keluarga sangat miskin, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini masalah pendidikan dasar, kesehatan dasar, bahkan tingkat penghasilan keluarga dapat diperhatikan, dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 32% dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Buleleng bersumber dari data BPS Kabupaten Buleleng.<sup>17</sup>

5. Penelitian Akmad Rozi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut” menjelaskan bahwa : (a) PKH dalam implementasinya di desa Batakan dan Kelurahan Pelaihari sebagai lokasi kasus dapat berjalan efektif karena didukung oleh faktor ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas dan aktibitas pendampingan; (b) Secara spesifik, PKH ternyata amat bermanfaat untuk mendukung kelangsungan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari RTSM, karena kebutuhannya riil dan penggunaan dananya juga terukur; (c) Bahwasanya PKH membutuhkan dukungan peran aparatur pemerintah lainnya terbukti dari adanya ketidakpuasan peserta PKH atas layanan yang diberikan oleh petugas di Posyandu, dan ihwalnya bermula dari terbatasnya jumlah petugas layanan sementara jumlah peserta PKH yang harus dilayani cukup banyak.<sup>18</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Utomo, Abdul Hakim dan Heru Ribawanto yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit

---

<sup>17</sup> Kadek Dina Indriani, Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017, h. 9.

<sup>18</sup> Akhmad Rozi, Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut, *FOCUS*, Universitas Lambung Mangkurat, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011, h. 78.

Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri) mengungkapkan bahwa target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa setiap tahunnya peserta PKH mengalami penurunan.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko serta tinjauannya dalam perspektif Ekonomi Islam, tentu penelitian ini akan memperoleh hasil berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>20</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan

---

<sup>19</sup> Dedy Utomo, Abdul Hakim dan Heru Ribawanto, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, h. 34.

<sup>20</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, h. 13.

memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Sedangkan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>22</sup>

Penulis mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelitian untuk memaparkan fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang Program Keluarga Harapan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) atau kuesioner penelitian.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 209.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 8.

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampling menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambil sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang bisa sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu warga Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti akan melakukan wawancara kepada warga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sampel sumber data.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.<sup>24</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai observer partisipasi aktif, jadi peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh responden, tetapi belum sepenuhnya

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 8.

<sup>24</sup> Tim FEBI IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 19.

lengkap.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Agar wawancara lebih valid peneliti, merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) yang dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yang meliputi letak geografis, struktur perangkat desa, buku-buku, arsip atau dokumen-dokumen lainnya.

## 5. Metode Analisis Data

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 227.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 231.

<sup>27</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, h. 208.



Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>29</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II :** Landasan Teori, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), kesejahteraan masyarakat serta kemiskinan.

**BAB III :** Gambaran umum Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yang terdiri dari letak geografis, kondisi monografi dan kondisi sosial ekonomi, serta kondisi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013, h. 247.

**BAB IV :** Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati serta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif Ekonomi Islam.

**BAB V :** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **G. Program Keluarga Harapan**

##### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>30</sup>

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *centre of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.<sup>31</sup> Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

---

<sup>30</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementerian Sosial RI, 2017, h. 1.

<sup>31</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 1.

pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.<sup>32</sup>

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia.<sup>33</sup>

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut<sup>34</sup>:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan LNRI Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235);

---

<sup>32</sup> Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)” *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 54.

<sup>33</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 2.

<sup>34</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 10-13.

7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan LNRI Nomor 3177);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 5294);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
25. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
27. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
31. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan.

### **3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan<sup>35</sup> :

1. untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.

### **4. Perkembangan Jumlah KPM PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2016,

---

<sup>35</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 13.

PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota dan 6.402 Kecamatan.<sup>36</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Jumlah KPM PKH**

<b>TAHU N</b>	<b>PROVIN SI</b>	<b>KAB/KOT A</b>	<b>KECAMA TAN</b>	<b>KPM PKH</b>
<b>2007</b>	7	48	337	387.947
<b>2008</b>	13	70	637	620.848
<b>2009</b>	13	70	781	726.376
<b>2010</b>	20	88	946	774.293
<b>2011</b>	25	119	1.387	1.152.201
<b>2012</b>	33	169	2.001	1.454.655
<b>2013</b>	33	336	3.417	2.326.533
<b>2014</b>	34	418	4.870	2.871.827
<b>2015</b>	34	472	6.080	3.511.088
<b>2016</b>	34	512	6.402	5.981.528

Sumber : Data dari Dinas Sosial

## **5. Hak dan Kewajiban KPM PKH**

### **a. Hak KPM PKH<sup>37</sup>**

- 1) menerima bantuan sosial;
- 2) pendampingan sosial;
- 3) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;  
dan
- 4) program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### **b. Kewajiban KPM PKH<sup>38</sup>**

Seluruh anggota KPM PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut:

<sup>36</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 14.

<sup>37</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 18.

<sup>38</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 18-19.



- 1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- 2) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- 3) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

c. Pemenuhan Kewajiban

Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada hak kepesertaan. Peserta yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program.<sup>39</sup>

Peserta yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tabel Ketentuan Penghentian Bantuan**  
**Ditangguhkan      Mendapatkan      Dihentikan**  
**Bantuan Kembali**

---

<sup>39</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 19.

Bantuan KPM akan dapat Kepesertaan PKH ditangguhkan jika menarik dana yang akan dikeluarkan jika anggota KPM sebelumnya KPM PKH tidak PKH tidak diblokir apabila memenuhi komitmen memenuhi pada tahap verifikasi yang telah komitmen yang berikutnya KPM ditentukan untuk 3 telah ditentukan PKH memenuhi kali siklus Penyaluran minimal 1 bulan komitmen. bantuan (9 bulan dalam siklus berturut-turut) melalui penyaluran investigasi dalam bantuan, maka monitoring dan dana yang ada di evaluasi kegiatan dan rekening akan bantuan yang ada diblokir. dalam rekening penerima menjadi hak KPM.

1. KPM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai KPM PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
2. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai KPM PKH.
3. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses sebagai berikut:
  - a. Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah KPM PKH di Kabupaten/Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;

- b. Dalam 3 (tiga) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c. Kabupaten/Kota menyatakan keluar dari program.

## 6. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada KPM yang memiliki komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahap, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap.<sup>40</sup>

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktr Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017.

**Tabel 2.3**  
**Besaran Bantuan PKH**

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan Sosial PKH	Rp. 1.890.000
2	Bantuan Lanjut Usia	Rp. 2.000.000
3	Bantuan Penyandang Disabilitas	Rp. 2.000.000
4	Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat	Rp. 2.000.000

Sumber : Data dari Dinas Sosial

2. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
3. Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar disalurkan:

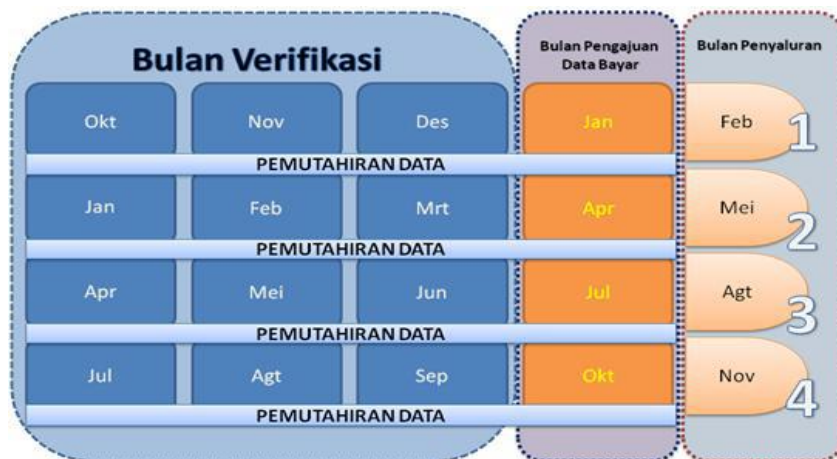
---

<sup>40</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 34.

- a. Satu tahun sekaligus dalam pelaksanaan Penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.
- b. Disalurkan per tahap dalam pelaksanaan Penyaluran bantuan dengan mekanisme tunai.

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan:

**Gambar 2.1**



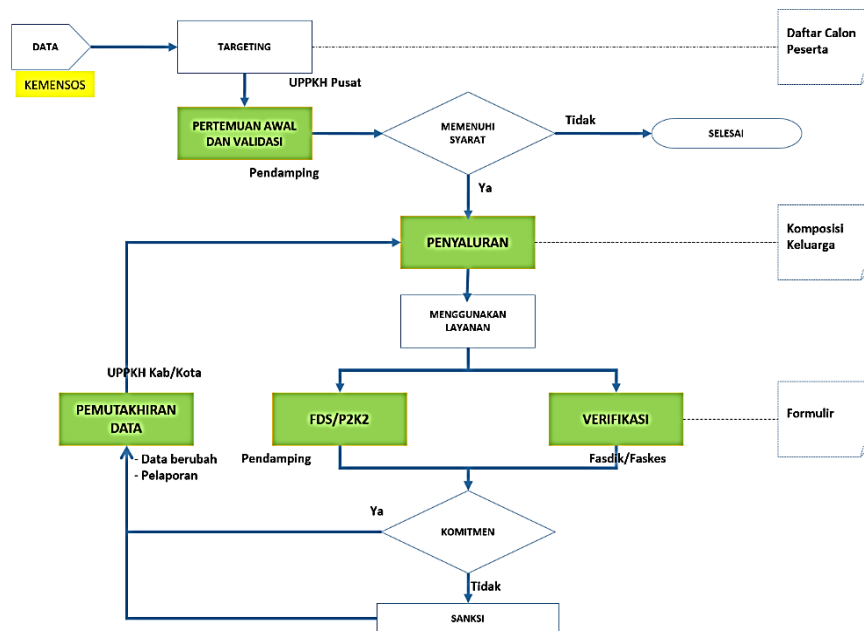
**Tahapan/Siklus Penyaluran**

## 7. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses utama Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 29.

**Gambar 2.2**  
**Alur Pelaksanaan PKH**



Dari skema di atas

menunjukkan bagaimana proses utama pelaksanaan PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. penetapan sasaran (*targetting*);
2. persiapan daerah;
3. pertemuan awal dan validasi;
4. penyaluran bantuan;
5. pembentukan kelompok KPM PKH;
6. verifikasi komitmen;
7. pemutakhiran data;
8. pengaduan.

### 8. Pendampingan PKH

Pendamping PKH bersama sama dengan mitra kerja pendamping program lainnya (TKSK, TAGANA, PSM) merupakan pendamping sosial Kementerian Sosial sebagai ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh

<sup>42</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 29.

Kementerian Sosial di lapangan yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial/Institusi Sosial daerah. Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.

Pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial melalui seleksi secara terbuka dengan persyaratan pendidikan minimal D3 dan bersedia ditempatkan di lokasi pelaksanaan PKH, dengan jumlah dampingan berkisar antara 250 hingga 300 KPM PKH. Khusus untuk daerah terpencil dan daerah dengan kategori sulit, sangat sulit dan sangat sangat sulit jumlah dampingan berkisar 100 hingga 200 KPM PKH.

Tugas utama Pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampingannya.
2. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai kepada sasaran.

Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia dan Penyandang Disabilitas Berat (PDB), dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lanjut Usia Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

2. Pendampingan PDB dilaksanakan oleh Pendamping Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lanjut usia dan PDB sampai kepada sasaran.

## **H. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.<sup>43</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).<sup>44</sup>

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok

---

<sup>43</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012. h. 8.

<sup>44</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016. h. 36.

tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.<sup>45</sup>

Pengertian masyarakat menurut Soetomo (2011) adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Edi Soeharto, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama.<sup>47</sup>

Sedangkan pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>48</sup> Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “*Social welfare is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the amelioration of specific social evils* (Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniah maupun sosial dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu).”<sup>49</sup>

Muhammad Abdul Mannan mengutip pendapat Dr. Dalton yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Pertama*, melalui perbaikan dalam sarana produksi, dan *kedua*, melalui mekanisme perbaikan dalam sistem distribusi. Perbaikan dalam sistem distribusi diwujudkan melalui upaya pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa tampak pada komunitas yang beradab dan pengurangan

---

<sup>45</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. h. 1-2.

<sup>46</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 25.

<sup>47</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014, h. 47.

<sup>48</sup> Isbandi Rukminto Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2015, h. 23.

<sup>49</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 36.



fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga, terutama masyarakat yang lebih miskin.<sup>50</sup>

Tahapan-tahapan kesejahteraan sebagaimana teori *need* milik Abraham Maslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).<sup>51</sup>

Ada tiga komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera:<sup>52</sup>

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dariungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang

---

<sup>50</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, h. 14.

<sup>51</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)*, h. 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

<sup>52</sup> Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 27.

dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

## 2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.<sup>53</sup>

Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:<sup>55</sup>

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

## 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

---

<sup>53</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 37.

<sup>54</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 40.

<sup>55</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 10.

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan antara lain sebagai berikut:<sup>56</sup>

**a. Badan Pusat Statistik (BPS)**

Tingkat kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal mereka terbuat dari bamboo, rumbia, atau yang berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi seperti sungai atau hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.

---

<sup>56</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 12-18.

<sup>57</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 44-45.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan dan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.

**b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.<sup>58</sup>

1. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
2. Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
  - a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
  - b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
  - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
  - d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
  - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
  - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut:
  - a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
  - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
  - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;

---

<sup>58</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 14-15.

- d. Luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah;
  - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
  - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
  - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
  - h. Pasangan usia subur dengan anak dua tahun atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 sd 14) dan indikator berikut:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
  - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
  - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
  - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
  - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sd 19) dan indikator berikut:
- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
  - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

#### **4. Kesejahteraan dalam Islam**

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah

“*al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.<sup>59</sup>

Secara kebahasaan perkataan “*al-falah*” berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur’an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur’an (QS. Al-Ankabut : 64) :<sup>60</sup>

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Artinya: “dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui” (QS. Al-Ankabut : 64).*

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.<sup>61</sup> Kesejahteraan yang dibangun al-Qur’an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan

<sup>59</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 1.

<sup>60</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 1.

<sup>61</sup> M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h. 6.

emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti padapemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur'an tercermin pada doa sapu jagat sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"”(QS. Al-Baqarah : 201).

Hakikat doa tersebut menegaskan bahwa kebaikan hidup di dunia yang menjadi sumber *al-falah* tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat, karena dalam pandangan Islam, akhirat itu merupakan tempat untuk memetik, sedangkan dunia adalah tempat untuk menanam.

Di dalam al-Qur'an, masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun*, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat yang sejahtera (*al-muflihun*), yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung,

---

<sup>62</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 2.

(meraih kesejahteraan dunia dan akhirat). Sebagaimana dalam al-Qur'an (QS. Al-Baqarah : 4-5) :<sup>63</sup>

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾  
أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.”

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.<sup>64</sup>

Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:<sup>65</sup>

- a) *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b) *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c) *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

---

<sup>63</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 2.

<sup>64</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 10.

<sup>65</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.



Ada tiga kebutuhan dasar yang mengantarkan manusia terus meningkatkan kesejahteraan dalam hidup dan berusaha untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini, yaitu :

- a. Kebutuhan *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.
- b. Kebutuhan *Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *dharuriyyah* dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.<sup>66</sup>

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*)”.<sup>67</sup>

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek

---

<sup>66</sup> Muhammad Akbar, Abdurahman, Sandy Rizki Febria, Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, h. 747, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan\\_syariah/article/viewFile/10709/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/viewFile/10709/pdf).

<sup>67</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 62.

kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfir keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.<sup>68</sup>

## **I. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta

---

<sup>68</sup> Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang – Volume 8, Nomor 1 (2017):* h. 158 <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.<sup>69</sup>

Menurut Ganjar Kartasasmita kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk, yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara suatu golongan dengan golongan lainnya. Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.<sup>70</sup>

Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous tahun depan).<sup>71</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan.<sup>72</sup>

## **2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan**

---

<sup>69</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 7.

<sup>70</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 16.

<sup>71</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 2.

<sup>72</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 42.

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

### **3. Penyebab Kemiskinan**

Menurut Ali Yafie terdapat petunjuk dari salah satu hadits yang mengungkapkan sebab-sebab kemiskinan, yang berbunyi:<sup>74</sup>

*“...aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan (al-‘ajz), kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang dan diperas atau dikuasai sesama manusia.”*

Di dalamnya tercantum hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:

---

<sup>73</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 3-4.

<sup>74</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 17.

*Pertama*, kelemahan. Apakah itu kelemahan hati hati dan semangat, atau kelemahan akal dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. Semua itu menguraangi daya pilih dan upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Kedua*, kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan oleh Islam sangat bertolak belakang dengan sifat ini.

*Ketiga*, ketakutan. Hal ini pun jelas merupakan penghambat utama mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya.

*Keempat*, kepelitan. Hal ini banyak bersangkutan dengan pihak si kaya, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitannya itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk dibenci oleh si miskin.

*Kelima*, terlilit hutang. Terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh hutang, karena hutang itu adalah sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang-hutang sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan.

*Keenam*, diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat, bangsa dan negara. Pemerasan manusia kuat menimbulkan sistem perbudakan, dan pemerasan manusia kaya menimbulkan sistem riba. Dan pemerasan pada tingkat masyarakat bangsa/negara menimbulkan sistem kapitalisme yang berkembang menjadi imperialisme. Kenyataan yang ada di negeri-negeri jajahan atau setengah jajahan membuktikan dengan jelas betapa besar kemiskinan yang memelaratkan masyarakat, berabad-abad lamanya sebagai akibat langsung dari sistem imperialisme itu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. *Adh-dha'if*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah keterampilan, sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi.
2. *Al-khauf*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang, atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil risiko gagal, rugi atau kehilangan modal.
3. *Al-kaslan*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal.
4. *Al-bakhil*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat.

#### **4. Kemiskinan dalam Islam**

Dilihat dari segi kebahasaan istilah miskin berasal kata kerja sakana, yang akar hurufnya terdiri atas sin-kaf-nun. Perkataan sakana mengandung arti diam, tetap, jumud, dan statis. Ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Oleh sebab itu, makna yang terkandung di dalam perkataan *miskin* lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada perkataan *fakir*.<sup>76</sup>

Berdasarkan pandangan para imam mazhab fiqih, KH. Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara itu, menurutnya orang fakir adalah orang yang tidak

---

<sup>75</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 10.

<sup>76</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 38-39.

memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya hanya mencukupi kurang dari seperdua dari kebutuhan pokoknya.<sup>77</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian; 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani.<sup>78</sup>

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.<sup>79</sup>

Banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah memohon perlindungan Allah SWT dari kemiskinan. Apabila memang kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu meminta permohonan perlindungan kepada Allah dari kemiskinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadist berikut, yang berarti:

---

<sup>77</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 42.

<sup>78</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 43.

<sup>79</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 43

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan.” (HR. Abu Daud, Nasa’I dan Ibnu Majah)

Tampak dari hadist tersebut sesungguhnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari semua hal yang melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang (kemiskinan), atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan).<sup>80</sup>

Menurut Al-Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) berusaha dan bekerja; (2) larangan menumpuk harta; (3) zakat; (4) hukum waris; (5) ghanimah; (6) hemat.<sup>81</sup>

Islam telah menetapkan dasar-dasar pembebasan manusia dari kemiskinan yang pelaksanaannya diwajibkan yang disertai janji pahala atau ancaman dosa, ataupun mencukupkan upaya meringankan tekanan kemiskinan hanya dengan cara kejiwaan, yakni bergaul bersama dan menghibur kaum fakir miskin berdasarkan faktor ketakwaan saja, tapi Islam menggunakan kedua cara itu bersama-sama, yakni cara pelaksanaannya yang diwajibkan dan cara kejiwaan. Dengan ini menjadi jelas kekeliruan orang-orang yang bersikap *ridha* (pasrah dan memuaskan diri) dengan apa saja yang berada di hadapannya dengan dalih bahwa Allah telah membagi-bagi rizki antara seluruh manusia dan telah menjadikan sebagian mereka kaya dan sebagian lainnya miskin.<sup>82</sup>

Menurut ajaran Islam, kaya dan miskin merupakan sebuah sunnatullah atau ketetapan Allah atas manusia. Karena manusia bermacam-macam. Diantara mereka diberikan kecerdasan, kemampuan dalam berkomunikasi,

---

<sup>80</sup> Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Bandung : Mizan, 1985, h. 36.

<sup>81</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 23-25.

<sup>82</sup> Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, h. 38.



dan di antara mereka juga mempunyai sifat yang berbeda beda, terdapat golongan yang rajin bekerja, dan ada golongan pemalas.<sup>83</sup>

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ خُنُوفًا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32)

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang mampu, baik kelompok kaya atau golongan menengah yang berkecukupan harta, terdapat bagian yang sebenarnya bukan milik mereka. Terdapat banyak nash maupun hadits yang mendukung pernyataan bahwa sistem ekonomi sebagaimana yang diharapkan Islam adalah terbentuknya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar semua rakyatnya.<sup>84</sup>

Mengurangi kesenjangan ekonomi lewat penerapan etika islam yang dapat diterapkan secara universal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) mendistribusikan harta dari negara kepada kelompok tidak mampu, dan menghindari kebijakan yang merugikan kelompok lemah, dan mencegah berputarnya kekayaan di antara orang kaya; (2) mencegah jatuhnya aset ekonomi, baik berupa lahan, pertambangan ataupun sektor lain yang mengausai hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, karena hal ini berlawanan dengan prinsip Nabi, bahwa manusia berserikat pada sumber-

<sup>83</sup> Muheramtohad S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*, Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, h. 21, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/283>.

<sup>84</sup> Muheramtohad S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*, h. 22

sumber ekonomi yang penting; serta (3) fokus pada sektor riil, terutama sektor UMKM, yang menyerap mayoritas tenaga kerja.<sup>85</sup>

## 5. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di akhir 2014. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut.<sup>86</sup>

1. Klaster I merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan

---

<sup>85</sup> Muheramtohad S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*, h. 22

<sup>86</sup> <https://k3dkebumen.wordpress.com/2016/07/13/kelompok-program-penanggulangan-kemiskinan-klaster-12-dan-3/> diakses tanggal 30 November pukul 22:11.

sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

3. Klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

##### **1. Profil Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

###### **a. Kondisi Geografis**

Desa Soko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Desa Soko memiliki luas wilayah 443,839 Ha.<sup>87</sup> Desa Soko merupakan daerah pertanian walaupun tadah hujan, karena tidak memiliki sungai maupun bendungan. Batas wilayah Desa Soko adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Sebelah Utara : perbatasan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah Desa Bringinwareng Kecamatan Winong.
- b. Sebelah Selatan : perbatasan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah Desa Sunggingwarno Kecamatan Gabus.
- c. Sebelah Timur : perbatasan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah Desa Tawangrejo Kecamatan Winong.
- d. Sebelah Barat : perbatasan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah Desa Koripandriyo Kecamatan Gabus.

Desa Soko mempunyai luas 443,839 Ha mempunyai 2 RW dan terbagi menjadi 3 perdukahan. Dukuh tersebut yaitu:

- Dukuh Bantengberik yang hanya terdiri dari 1 RT.
- Dukuh Karanganyar yang juga hanya terdiri dari 1 RT.
- Soko yang mempunyai 10 RT.

###### **b. Lembaga Pemerintahan**

Desa Soko mempunyai seorang kepala desa yang bernama Hj. Munsri S. Pd dan 11 orang yang menjabat sebagai perangkat desa.

---

<sup>87</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

<sup>88</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

Berikut data kepegawaian Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati:<sup>89</sup>

**Tabel 3.1**

**Data Kepegawaian Desa Soko**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Munsri S. Pd.	Kepala Desa
2.	Sutejo	Sekretaris Desa
3.	Juli Nur Cholifah	Kasi Pemerintahan
4.	Sholihati	Kasi Pembangunan
5.	Kasmuri	Kasi Kesra
6.	Abdul Riszal	Kaur Keuangan
7.	Sudarno	Kaur Adm. dan umum
8.	Andre Sugiyono	Kepala Dusun
9.	Luthfi M. R.	Staf Pemerintahan
10.	Sumiati	Staf Pembangunan
11.	Ratna Juwita	Staf Keuangan
12.	Masduqi	Staf Adm. dan Umum

Sumber : Data dari Desa Soko

**c. Kondisi Iklim**

Desa Soko berada di dataran rendah dengan ketinggian 0 - 1.000 m dari permukaan laut dengan curah hujan sekitar 1.876 mm, dengan suhu udara rata-rata 27.0 °C. Dengan demikian kondisi iklim di daerah ini adalah beriklim tropis.<sup>90</sup>

**d. Kondisi Geologi dan Geomorfologi**

Struktur geologi di daerah ini adalah berupa **sesar dan kubah**. Daerah ini merupakan bagian dari antiklinorium rembang dengan sumbu antiklin dan siklin yang mempunyai arah barat - timur dan barat

---

<sup>89</sup> Data dari Desa Soko

<sup>90</sup> <https://id.climate-data.org/location/26742>(diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 09.28 WIB).

laut - tenggara. Struktur sesar normal dengan arah timur laut - barat daya yang mensesar litologi batu gamping pada Formasi Bulu.

Sedangkan kondisi geomorfologi daerah Kabupaten Pati termasuk di dalam lajur Zona Rembang ( Rembang Zone ) yang terdiri dari pegunungan lipatan berbentuk antiklinorium yang memanjang mulai dari utara Purwodadi melalui Blora, Jatirogo, Tuban dan berakhir di Pulau Madura. Daerah ini terdiri dari dataran rendah, perbukitan bergelombang dan pegunungan berlereng terjal dengan ketinggian 0 sampai dengan 650 meter. Punggung perbukitan dan pegunungan tersebut umumnya memanjang dengan arah barat - timur.<sup>91</sup>

#### e. Kondisi kependudukan

##### 1. Berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data monografi Desa Soko, kondisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

**Tabel 3.2**  
**Kondisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	703 orang
2	Perempuan	753 orang
Total		1.456 orang

Sumber: Data monografi Desa Soko Tahun 2018

Berdasarkan data monografi di atas, jumlah penduduk perempuan di Desa Soko lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

##### 2. Berdasarkan komposisi umur

Berdasarkan data monografi Desa Soko, kondisi kependudukan berdasarkan komposisi umur adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> <https://bpbd.patikab.go.id/Profil-Daerah> (diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 09.37 WIB).

<sup>92</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

**Tabel 3.3**

**Kondisi kependudukan berdasarkan komposisi umur**

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>
1.	0-4	43 orang
2.	5-9	73 orang
3.	10-14	130 orang
4.	15-19	140 orang
5.	20-24	160 orang
6.	25-29	138 orang
7.	30-39	145 orang
8.	40-49	169 orang
9.	50-59	191 orang
10.	60 keatas	267 orang
	Jumlah	1.456 orang

Sumber: Data monografi Desa Soko Tahun 2018.

Jumlah penduduk di Desa Soko paling banyak pada usia 60 tahun keatas.

**3. Berdasarkan mata pencaharian**

Berdasarkan data monografi Desa Soko, kondisi kependudukan berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut<sup>94</sup>

**Tabel 3.4**

**Kondisi kependudukan berdasarkan mata pencaharian (Bagi usia 10 tahun keatas)**

<b>No</b>	<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
-----------	-------------------------	---------------

---

<sup>93</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

<sup>94</sup> Data monografi Desa Soko tahun 2018.

1.	Petani sendiri	245 orang
2.	Buruh Tani	591 orang
3.	Nelayan	2 orang
4.	Pengusaha	60 orang
5.	Pegawai Swasta	15 orang
6.	Buruh Industri	26 orang
7.	Buruh Bangunan	15 orang
8.	Pedagang	45 orang
9.	Sopir	14 orang
10.	PNS/POLRI/TNI	7 orang
11.	Pensiunan	3 orang
TOTAL		1.113 Orang

Sumber: Data monografi Desa Soko Tahun 2018

Dari data monografi, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani.

#### 4. Berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan data monografi Desa Soko, kondisi kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

**Tabel 3.5**

#### **Kondisi kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
-----	--------------------	--------

<sup>95</sup> Data monografi Desa Soko tahun 2018.



1.	Belum Sekolah	8 orang
2.	Tidak sekolah	15 orang
3.	Tidak tamat SD	108 orang
4.	Tamat SD/ sederajat	338 orang
5.	Tamat SLTP/ sederajat	660 orang
6.	Tamat SLTA/ sederajat	224 orang
7.	Tamat Akademi	30 orang
8.	Tamat Sarjana (S1,S2 & S3)	20 orang
	Jumlah	1.456 orang

Sumber: Data monografi Desa Soko tahun 2018

Dari data monografi, mayoritas penduduk Desa Soko adalah yang tamat SLTP/ sederajat.

## **B. Kondisi masyarakat Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.**

### **1. Kondisi Sosial Ekonomi**

Kegiatan perekonomian desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian mengingat wilayah Desa Soko seluas 1.443,887 Ha adalah persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapat serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalny barang-barang kebutuhan sembako.

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan

peternakan ; ayam, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Desa Soko masih perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi umum baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemanfaatan potensi-potensi yang ada dibutuhkan untuk kesejahteraan penduduk desa setempat.

Keseharian masyarakat Desa Soko adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, pekerja serabutan, buruh bangunan, berdagang dan lain sebagainya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian palawija dan padi dengan menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini. Selain bercocok tanam, masyarakat juga bermata pencaharian sebagai peternak ayam, kambing dan sapi.<sup>96</sup>

## 2. **Kondisi Sosial Budaya**

Masyarakat Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menjunjung tinggi budaya serta sosialitas secara baik. Segenap masyarakat setempat juga menjaga etika sopan santun dalam bergaul. Etika sopan santun itu diaplikasikan warga dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berinteraksi, sosialisasi maupun dalam menjalankan tradisi desa.

Selain itu, masyarakat setempat juga masih menjaga hasanah budayanya. Misalkan:

- Tahlilan, mujahadah, pembacaan manaqib, dan asma'ul husna setiap minggunya di setiap RT, RW, dusun dan desa.
- Sedekah desa

## 3. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Warga Desa Soko seluruhnya beragama Islam dengan tingkat keagamaan yang baik.<sup>97</sup> Dengan sarana peribadatan yang terdapat di Desa Soko antara lain adalah:

**Tabel 3.6**

---

<sup>96</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

<sup>97</sup> Dokumentasi data monografi Desa Soko tahun 2018.

### Data sarana peribadatan Desa Soko

No.	Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1 Unit
2.	Mushola	2 Unit
3.	Gereja	0 Unit
4.	Pura	0 Unit
5.	Vihara	0 Unit
6.	Klenteng	0 Unit

Sumber : Data dari Desa Soko

### C. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; serta Pengurangan kematian ibu melahirkan.<sup>98</sup>

Peserta PKH Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati berjumlah 70 anggota.<sup>99</sup> Berikut adalah daftar nama Peserta Desa Soko:

---

<sup>98</sup> <http://keluargaharapan.com/apa-tujuan-dan-siapa-penerima-manfaat-keluarga-harapan/> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 22:36.

<sup>99</sup> Dokumentasi data Dinas Sosial tahun 2018.

**Tabel 3.7**

**Data Penerima PKH Desa Soko**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>
1.	Kusniati	Soko	RT 03 RW 02
2.	Sumarni	Soko	RT 02 RW 01
3.	Kusrini	Soko	RT 01 RW 01
4.	Sulasih	Soko	RT 01 RW 01
5.	Siti Murwati	Soko	RT 03 RW 02
6.	Siti Nurhayati	Soko	RT 04 RW 01
7.	Wakilah	Soko	RT 01 RW 01
8.	Rita Susanti	Soko	RT 02 RW 02
9.	Kumyati	Soko	RT 04 RW 01
10.	Mukinah	Soko	RT 01 RW 02
11.	Misnamar	Soko	RT 04 RW 02
12.	Defina	Soko	RT 05 RW 01
13.	Sarni	Soko	RT 05 RW 02
14.	Siti Khotijah	Soko	RT 02 RW 01
15.	Munsaati	Soko	RT 03 RW 02
16.	Gini	Soko	RT 01 RW 01
17.	Asih Fitri	Soko	RT 05 RW 01

Yanti

18.	Suharni	Soko	RT 03 RW 01
19.	Suminah	Soko	RT 06 RW 02
20.	Sugiarti	Soko	RT 05 RW 01
21.	Maryati	Soko	RT 03 RW 01
22.	Hartatik	Soko	RT 04 RW 02
23.	Rasmini	Soko	RT 02 RW 01
24.	Sutri Lestari	Soko	RT 01 RW 01
25.	Siti Nuraeni	Soko	RT 04 RW 01
26.	Sudarwati	Soko	RT 03 RW 02
27.	Sulastri	Soko	RT 06 RW 02
28.	Purwati	Soko	RT 02 RW 01
29.	Sri Biyati	Soko	RT 04 RW 01
30.	Lilik	Soko	RT 04 RW 01
	Sudarwati		
31.	Masfuatun	Soko	RT 05 RW 01
32.	Suyati	Soko	RT 04 RW 01
33.	Suci Rahayu	Soko	RT 05 RW 01
34.	Darsih	Soko	RT 07 RW 02
35.	Sudarmi	Soko	RT 05 RW 01
36.	Mukinah	Soko	RT 02 RW 02

37.	Ngatini	Soko	RT 01 RW 01
38.	Suntari	Soko	RT 02 RW 01
39.	Darmi	Soko	RT 04 RW 02
40.	Sarni	Soko	RT 06 RW 02
41.	Sarmini	Soko	RT 07 RW 02
42.	Sriyatin	Soko	RT 03 RW 01
43.	Siti Kalimah	Soko	RT 06 RW 02
44.	Sunarsih	Soko	RT 04 RW 01
45.	Nasih	Soko	RT 03 RW 02
46.	Sundari	Soko	RT 02 RW 02
47.	Wakilah	Soko	RT 02 RW 01
48.	Mukinah	Soko	RT 04 RW 01
49.	Uyun Rosida	Soko	RT 01 RW 01
50.	Yasmi	Soko	RT 01 RW 01
51.	Suparmiati	Soko	RT 07 RW 02
52.	Kuswati	Soko	RT 07 RW 02
53.	Patemi	Soko	RT 03 RW 02
54.	Sunti	Soko	RT 01 RW 01
55.	Sugi	Soko	RT 01 RW 01
56.	Sri Hartatik	Soko	RT 02 RW 01

57.	Tarsih	Soko	RT 02 RW 01
58.	Suparman	Soko	RT 02 RW 01
59.	Suyati	Soko	RT 03 RW 01
60.	Rukini	Soko	RT 03 RW 01
61.	Rusmi	Soko	RT 05 RW 01
62.	Sulastri	Soko	RT 01 RW 02
63.	Warsini	Soko	RT 02 RW 02
64.	Suyikno	Soko	RT 02 RW 02
65.	Sarni	Soko	RT 03 RW 02
66.	Warsini	Soko	RT 05 RW 02
67.	Marsinah	Soko	RT 05 RW 02
68.	Sarmi	Soko	RT 06 RW 02
69.	Sarban	Soko	RT 06 RW 02
70.	Pujiwati	Soko	RT 07 RW 02

Sumber: Data Dinas Sosial tahun 2018

Guna mencapai terjadinya perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi lebih lanjut yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki masa depan keluarga.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diujicobakan pada tahun 2014 dan mulai dilatihkan kepada Pendamping PKH sejak tahun 2015. P2K2 awalnya diberikan pada tahun kelima KPM yang memasuki masa transisi

(belum mengalami perbaikan) dengan tujuan mempersiapkan KPM lepas dari bantuan PKH.

Dalam kerangka Inisiatif Baru PKH yang diluncurkan pada tahun 2016, intervensi P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama KPM menerima bantuan PKH. Dengan demikian, semua Pendamping PKH wajib melaksanakan P2K2 sebagai bagian dari tugas dan fungsinya.<sup>100</sup>

Tujuan P2K2 adalah :<sup>101</sup>

- a. Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
- b. Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
- c. Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
- d. Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.
- e. Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas.
- f. Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.

Komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah :<sup>102</sup>

- a. Modul P2K2

---

<sup>100</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 20.

<sup>101</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 21.

<sup>102</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 21-22.



Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Pada tahun 2016, komponen rehabilitasi sosial ditambahkan sebagai salah satu bahan ajar dalam P2K2. Modul P2K2 dapat direvisi dengan dukungan *evidence based* untuk menyesuaikan dengan dinamika program dan atau kebutuhan KPM.

b. Pendidikan dan Pelatihan P2K2

P2K2 dilatihkan kepada Pendamping PKH melalui Diklat P2K2 maupun skema diklat lainnya yang ditentukan oleh program.

c. Bahan Ajar

Pengadaan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi.

d. Waktu Pelaksanaan P2K2

Pemberian materi P2K2 dilaksanakan sebulan sekali selama 6 tahun kepesertaan KPM dalam PKH. Materi dalam modul pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan anak wajib disampaikan kepada KPM dengan pengulangan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan KPM.

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P2K2

P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap KPM PKH yang menjadi dampungannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator kabupaten/kota, dan koordinator wilayah.

P2K2 Desa Soko sudah berjalan dengan baik serta mendapatkan antusias yang sangat baik dari peserta PKH. P2K2 Desa Soko dilakukan setiap satu bulan sekali dirumah salah satu penerima PKH. P2K2 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars PKH. Kemudian

dilanjutkan dengan pemberian materi oleh pendamping PKH. Dalam memberikan materi, pendamping PKH juga dapat dengan mudah dipahami oleh peserta PKH. Dalam menyampaikan materi, pendamping PKH juga sangat bersabababat dengan peserta PKH. Materi yang disampaikan sudah disediakan modul oleh pemerintah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami (Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

## BAB IV PEMBAHASAN

### **A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>104</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.<sup>105</sup>

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan tingkat pencapaian:<sup>106</sup>

1. Tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
2. Tepat jumlah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3. Tepat guna adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untuk keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Tepat waktu adalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko baru terlaksana pada tahun 2013. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk terlaksananya Program

---

<sup>104</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 1.

<sup>105</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 2.

<sup>106</sup> Abstract Thesis berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=45900](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45900), (diakses tanggal 20 November 2018 pukul 10.18 WIB).

Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko bernama Dina Sri Utami yang bertempat tinggal di Desa Serut Sadang Kecamatan Winong.<sup>107</sup>

Desa Soko merupakan salah satu desa di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta KPM Desa Soko sebanyak 70 KPM.<sup>108</sup> Berikut data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko:<sup>109</sup>

**Tabel 4.1**  
**Data Penerima PKH Desa Soko**

No	Nama	Nama Kelurahan	Alamat
1.	Kusniati	Soko	RT 03 RW 02
2.	Sumarni	Soko	RT 02 RW 01
3.	Kusrini	Soko	RT 01 RW 01
4.	Sulasih	Soko	RT 01 RW 01
5.	Siti Murwati	Soko	RT 03 RW 02
6.	Siti Nurhayati	Soko	RT 04 RW 01
7.	Wakilah	Soko	RT 01 RW 01
8.	Rita Susanti	Soko	RT 02 RW 02
9.	Kumyati	Soko	RT 04 RW 01

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar (Ketua Kelompok KPM I Desa Soko tanggal 22 September 2018 pukul 15:43).

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>109</sup> Data dari Dinas Sosial.

10.	Mukinah	Soko	RT 01 RW 02
11.	Misnamar	Soko	RT 04 RW 02
12.	Defina	Soko	RT 05 RW 01
13.	Sarni	Soko	RT 05 RW 02
14.	Siti Khotijah	Soko	RT 02 RW 01
15.	Munsaati	Soko	RT 03 RW 02
16.	Gini	Soko	RT 01 RW 01
17.	Asih Fitri Yanti	Soko	RT 05 RW 01
18.	Suharni	Soko	RT 03 RW 01
19.	Suminah	Soko	RT 06 RW 02
20.	Sugiarti	Soko	RT 05 RW 01
21.	Maryati	Soko	RT 03 RW 01
22.	Hartatik	Soko	RT 04 RW 02
23.	Rasmini	Soko	RT 02 RW 01
24.	Sutri Lestari	Soko	RT 01 RW 01
25.	Siti Nuraeni	Soko	RT 04 RW 01
26.	Sudarwati	Soko	RT 03 RW 02
27.	Sulastri	Soko	RT 06 RW 02
28.	Purwati	Soko	RT 02 RW 01
29.	Sri Biyati	Soko	RT 04 RW 01

30.	Lilik Sudarwati	Soko	RT 04 RW 01
31.	Masfuatun	Soko	RT 05 RW 01
32.	Suyati	Soko	RT 04 RW 01
33.	Suci Rahayu	Soko	RT 05 RW 01
34.	Darsih	Soko	RT 07 RW 02
35.	Sudarmi	Soko	RT 05 RW 01
36.	Mukinah	Soko	RT 02 RW 02
37.	Ngatini	Soko	RT 01 RW 01
38.	Suntari	Soko	RT 02 RW 01
39.	Darmi	Soko	RT 04 RW 02
40.	Sarni	Soko	RT 06 RW 02
41.	Sarmini	Soko	RT 07 RW 02
42.	Sriyatin	Soko	RT 03 RW 01
43.	Siti Kalimah	Soko	RT 06 RW 02
44.	Sunarsih	Soko	RT 04 RW 01
45.	Nasih	Soko	RT 03 RW 02
46.	Sundari	Soko	RT 02 RW 02
47.	Wakilah	Soko	RT 02 RW 01
48.	Mukinah	Soko	RT 04 RW 01
49.	Uyun Rosida	Soko	RT 01 RW 01

50.	Yasmi	Soko	RT 01 RW 01
51.	Suparmiati	Soko	RT 07 RW 02
52.	Kuswati	Soko	RT 07 RW 02
53.	Patemi	Soko	RT 03 RW 02
54.	Sunti	Soko	RT 01 RW 01
55.	Sugi	Soko	RT 01 RW 01
56.	Sri Hartatik	Soko	RT 02 RW 01
57.	Tarsih	Soko	RT 02 RW 01
58.	Suparman	Soko	RT 02 RW 01
59.	Suyati	Soko	RT 03 RW 01
60.	Rukini	Soko	RT 03 RW 01
61.	Rusmi	Soko	RT 05 RW 01
62.	Sulastri	Soko	RT 01 RW 02
63.	Warsini	Soko	RT 02 RW 02
64.	Suyikno	Soko	RT 02 RW 02
65.	Sarni	Soko	RT 03 RW 02
66.	Warsini	Soko	RT 05 RW 02
67.	Marsinah	Soko	RT 05 RW 02
68.	Sarmi	Soko	RT 06 RW 02
69.	Sarban	Soko	RT 06 RW 02

70. Pujiwati                      Soko                      RT 07 RW 02

Sumber : Data dari Dinas Sosial tahun 2018

Dengan perkembangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2013-2017 sebagai berikut:<sup>110</sup>

**Tabel 4.2**

**Data Perkembangan KPM dari 2013-2017**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	PKH pada tahun 2013	23 KPM
2.	PKH pada tahun 2016	23 KPM
3.	PKH pada tahun 2017	24 KPM

Sumber: Data dari Dinas Sosial Tahun 2018

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah KPM Desa Soko yang mendapatkan PKH sejumlah 70 KPM. Jumlah KPM pada tahun 2016 sama dengan jumlah KPM pada tahun 2013 yaitu sebanyak 23 KPM. Jadi pada tahun 2016 tidak ada peningkatan dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah KPM yaitu sebanyak 1 KPM dari tahun 2016.

Keberhasilan suatu Program Keluarga Harapan (PKH) di suatu daerah harus memenuhi empat pencapaian tersebut. Berdasarkan data pada lapangan diperoleh data sebagai berikut:

1. Tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu

---

<sup>110</sup> Data dari Dinas Sosial



Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>111</sup>

Berikut pandangan mengenai ketepatan sasaran yang diketahui oleh informan yang mewakili semua *stakeholder* pelaksanaan PKH. Berikut kutipan wawancara dengan Mbak Dina Sri Utami Pendamping PKH Desa Soko yang mengatakan PKH Desa Soko sudah tepat sasaran:

*“Selama ini PKH Desa Soko sudah tepat sasaran. Karena soalnya kan data PKH didapat dari data BDT, sudah dapat data. Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah yang disebut dengan pertemuan awal. Kan kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas.”<sup>112</sup>*

Hasil dari wawancara dengan Ibu Misnamar selaku ketua kelompok KPM I Desa Soko juga menyatakan bahwa KPM Desa Soko sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah dan sudah tepat sasaran:

*“Sudah. Menurut saya, PKH Desa Soko sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena dulu waktu saya itu, ada peninjauan langsung dari petugas datang ke rumah. Jadi melihat kondisi rumah juga waktu tahun 2013 itu. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari petugas PKH.”<sup>113</sup>*

Pandangannya sama dengan penerima program PKH yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Lilik Sudarwati, menurutnya PKH Desa Soko sudah tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Sudah mbak. Selama ini saya lihat penerima PKH Desa Soko sudah tepat sasaran. Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dilihat dari rumah, terkadang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian, karena*

---

<sup>111</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, Kementerian Sosial RI, 2017, h. 2.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

*bisa saja rumah itu dulu waktu masih mempunyai uang sebelum kebutuhan anak-anak bertambah banyak mbak. Contohnya saya sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Karena anak-anak sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin banyak.”*<sup>114</sup>

Begitupun jawaban wawancara dengan Ibu Maryati, penerima PKH yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya PKH di Desa Soko sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

*“Sudah. Menurut saya sih sudah tepat sasaran mbak. Yang mendapatkan PKH kan orang yang kurang mampu.”*<sup>115</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri juga mengatakan bahwa PKH sudah tepat sasaran di Desa Soko. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Kalau saya lihat, PKH Desa Soko sudah tepat sasaran mbak.”*<sup>116</sup>

Wawancara dengan Ibu Uyun Rosida pun menyampaikan bahwa ketepatan sasaran PKH Desa Soko sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah:

*“PKH Desa Soko sudah tepat sasaran mbak.”*<sup>117</sup>

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Ibu Sri Yatin selaku Ketua Kelompok KPM 2 Desa Soko. Berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau menurut saya sudah sesuai mbak. Sudah tepat sasaran.”*<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai ketepatan sasaran PKH di Desa Soko dapat disimpulkan bahwa PKH di Desa Soko sudah tepat sasaran karena masyarakat penerima PKH di Desa Soko adalah masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah KPM, alas rumahnya pun masih banyak yang tanah, tidak semen maupun berkeramik. Terkadang

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Sudarwati tanggal 1 November 2018 pukul 08.47.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati tanggal 1 November 2018 pukul 18.16.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri tanggal 1 November 2018 pukul 10.20.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Uyun Rosida tanggal 1 November 2018 pukul 16.02.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yatin tanggal 2 November 2018 pukul 14.09.

genteng pun masih belum permanen. Dan juga dinding masih terbuat dari kayu dan belum memiliki pondasi. Berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) belum memiliki perumahan yang cukup layak huni. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sudah tepat sasaran.

2. Tepat jumlah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berikut besaran bantuan PKH:<sup>119</sup>

**Tabel 4.3**  
**Besaran Bantuan PKH**

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan Sosial PKH	Rp. 1.890.000
2	Bantuan Lanjut Usia	Rp. 2.000.000
3	Bantuan Penyandang Disabilitas	Rp. 2.000.000
4	Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat	Rp. 2.000.000

Sumber: Data dari Dinas Sosial

Di bawah ini diuraikan pandangan mengenai ketepatan jumlah dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Berikut kutipan wawancara dengan Mbak Dina Sri Utami:

*“Selama saya mendampingi Desa Soko, jumlah bantuan yang disalurkan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Tidak ada penarikan dari pihak manapun juga. Dan penyaluran PKH langsung disalurkan ke masing-masing rekening penerima PKH. Hanya saja kalau waktunya penyaluran, pendamping hanya menyampaikan bahwa dana PKH sudah keluar dan dapat di ambil di rekening masing-masing penerima PKH.”<sup>120</sup>*

<sup>119</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 34.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07

Begitupun jawaban yang sama dengan penerima PKH lain, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sulastri:

*“Selama mendapat PKH, jumlahe selalu sama mbak. Tidak ada pengurangan. Kalau dana keluar saya langsung ke ATM BNI. Jadi dananya saya ambil sendiri di ATM.”*<sup>121</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar juga menyatakan bahwa dana selalu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dana PKH keluar sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh pendamping PKH mbak.”*<sup>122</sup>

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lilik Sudarwati, berikut hasil wawancaranya:

*“Sama mbak, dengan yang pernah disampaikan oleh Pendamping PKH dan tidak ada pengurangan dari siapapun dan pihak manapun.”*<sup>123</sup>

Wawancara dengan Ibu Maryati juga mendapatkan jawaban yang sama, berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya selalu mendapatkan PKH dalam setahun 4 kali dan jumlahnya sama dengan yang lain.”*<sup>124</sup>

Menurut Ibu Uyun Rosida, jumlah dana yang diterima selama ini juga sudah sama dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, berikut kutipan wawancaranya;

*“Saya selalu mendapatkan PKH sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah mbak. Dalam satu tahun, cair sebanyak empat kali mbak. Pertama mendapat lima ratus ribu. Kemudian pencairan kedua saya mendapat lima ratus ribu. Ketiga saya mendapatkan lima ratus ribu juga mbak. Yang keempat dapat tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah.”*<sup>125</sup>

Jawaban wawancara dari Ibu Sri Yatin juga sama dengan yang lain, berikut kutipan wawancaranya:

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri tanggal 1 November 2018 pukul 10.20.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Sudarwati tanggal 1 November 2018 pukul 08.47.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati tanggal 1 November 2018 pukul 18.16.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Uyun Rosida tanggal 1 November 2018 pukul 16.02.

*“Iya mbak. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.”<sup>126</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang sudah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada pemotongan dari siapapun dan pihak apapun. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah tepat jumlah.

3. Tepat guna adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untuk keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>127</sup>

Menurut Mbak Dina selaku pendamping PKH Desa Soko, penerima PKH Desa Soko sudah menggunakan dana PKH dengan sangat baik. Menurutnya, dana PKH bisa membantu memenuhi kebutuhan anak sekolah jika komponen anak sekolah. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya selaku pendamping PKH Desa Soko selalu melakukan pendampingan PKH di Desa Soko dengan rajin setiap bulan selalu datang ke rumah warga untuk mengadakan pertemuan. Setiap pertemuan ada materi yang saya sampaikan. Salah satunya yaitu materi untuk menggunakan uang dan mengelola keuangan keluarga dengan baik. Saya juga menyampaikan kepada KPM untuk menabung, kalau bisa. Dari situ, saya memberikan pengetahuan kepada KPM untuk menggunakan uang PKH dengan baik. Yaitu menggunakan uang tersebut sesuai untuk pendidikan, yaitu membeli buku, membayar SPP, perbaikan gizi anak jug. Itu yang untuk anak sekolah. Jika untuk ibu hamil ya berarti memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan ibu hamil. Untuk lansia pun begitu. Lansia menggunakan dana PKH untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu untuk membeli lauk pauk yang bergizi dan untuk berobat ketika sakit misalnya. Jadi menurut saya, dana PKH sudah digunakan dengan baik oleh KPM. Karena saya juga meminta KPM untuk membuat daftar laporan pengeluaran dana PKH tersebut beserta nota atau kuitansinya. Jadi bisa saya pantau dari situ. Dan untuk apa dana PKH tersebut digunakan. Dari laporan tersebut,*

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yatin tanggal 2 November 2018 pukul 14.09.

<sup>127</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 2.

*selama ini saya melihat bahwa KPM sudah menggunakan dana PKH sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.”<sup>128</sup>*

Ibu Sulastri juga mengatakan bahwa dana PKH sudah digunakan sebagaimana mestinya. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya menggunakan dana PKH untuk membayar anak sekolah mbak. Untuk SPP, untuk membeli buku, keperluan sekolah, membeli tas.”<sup>129</sup>*

Jawaban dari Ibu Misnamar juga sama dengan Ibu Sulastri. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya menggunakan uang PKH untuk membiayai anak saya sekolah. Dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.”<sup>130</sup>*

Menurut Ibu Lilik Sudarwati, dana PKH untuk Ibu Lilik Sudarwati juga sesuai dengan kegunaan uang PKH. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Uang PKH saya gunakan untuk membayar SPP, membeli susu, membeli keperluan sekolah contohnya tas sepatu dan buku. Apalagi mbak Dina meminta kami untuk melaporkan kegunaan uang tersebut. Jadi saya punya laporannya. Dan saya selalu menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Saya tidak berani untuk menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan yang pernah di sampaikan oleh Mbak Dina. Jadi saya memang menggunakan dana PKH untuk kebutuhan sekolah anak saya mbak.”<sup>131</sup>*

Wawancara dengan Ibu Maryati juga menghasilkan hal sama, berikut kutipan wawancaranya:

*“Iya mbak. Saya selalu menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sekolah anak saya.”<sup>132</sup>*

Ibu Uyun Rosida juga mengatakan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya:

*“Uang tersebut saya gunakan untuk membayar SPP mbak. Sama untuk membeli lauk agar bergizi. Dan juga membelikan susu.”<sup>133</sup>*

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri tanggal 1 November 2018 pukul 10.20.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Sudarwati tanggal 1 November 2018 pukul 08.47.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati tanggal 1 November 2018 pukul 18.16.

Menurut Ibu Sri Yatin, dana PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya selalu menggunakan uang tersebut untuk biaya sekolah anak saya mbak.”*<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan KPM, dapat disimpulkan bahwa PKH sudah tepat guna. Karena KPM menggunakan dananya sesuai dengan arahan dari pendamping PKH dan sesuai dengan harapan pemerintah agar dana digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan yang penting lainnya. Apalagi dengan adanya laporan penggunaan dana PKH yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut kepada pendamping PKH, sehingga KPM tidak berani untuk menggunakan dananya tidak sesuai dengan arahan dari pendamping PKH. Karena pendamping PKH selalu memantau kegunaan dana PKH tersebut setiap pencairan dana PKH.

4. Tepat waktu adalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu Bulan Februari, Mei, Agustus, November.<sup>135</sup>

Menurut wawancara dengan Pendamping PKH Desa Soko, Dina Sri Utami mengatakan bahwa waktu pencairan dana PKH selalu sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Tidak pernah ada keterlambatan pencairan. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dana PKH selalu turun tepat waktu selama saya mendampingi. Dan tidak pernah molor dari jadwal yang ditentukan pemerintah. Biasanya saya langsung memberitahukan kepada KPM kalau dana PKH sudah turun. Jadi bisa diambil di ATM. Saya selalu mendampingi di ATM jika ada pencairan dananya.”*<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Uyun Rosida tanggal 1 November 2018 pukul 16.02.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yatin tanggal 2 November 2018 pukul 14.09.

<sup>135</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* h. 35.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07

Menurut Ibu Misnamar, PKH juga selalu turun tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dana PKH selalu turun tepat waktu mbak. Tidak pernah terlambat. Yaitu setiap tiga bulan sekali itu.”*<sup>137</sup>

Wawancara dengan Ibu Sulastri juga mengatakan bahwa PKH selalu turun tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dana PKH turun tepat waktu mbak. Tidak pernah terlambat kok.”*<sup>138</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Sudarwati juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah tepat waktu dalam menyalurkan dana PKH. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Iya mbak. Selalu tepat waktu kok. Tidak pernah terlambat.”*<sup>139</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maryati bahwa PKH tidak pernah terlambat dalam pencairannya. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Iya betul. PKH selalu cair tepat waktu.”*<sup>140</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Uyun Rosyida, bahwa PKH selalu tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Iya mbak. Selalu tepat waktu dalam penyalurannya.”*<sup>141</sup>

Ibu Sri Yatin juga mengungkapkan hal yang sama bahwa PKH selalu tepat waktu dalam pencairannya, berikut kutipan wawancaranya:

*“Sudah. Selalu tepat waktu mbak. Belum waktunya turun saja, kadang sudah diharapkan untuk turun.”*<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setahun keluar sebanyak empat kali yaitu pada bulan

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri tanggal 1 November 2018 pukul 10.20.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Sudarwati tanggal 1 November 2018 pukul 08.47.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati tanggal 1 November 2018 pukul 18.16.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Uyun Rosida tanggal 1 November 2018 pukul 16.02.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yatin tanggal 2 November 2018 pukul 14.09.



Februari, Mei, Agustus dan November. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah tepat waktu.

Berdasarkan empat pencapaian program Program Keluarga Harapan (PKH) di atas bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko dapat diartikan sudah terlaksana dengan baik. Karena sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja kuota dari pemerintah yang masih kurang. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko belum merasakan manfaat adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini.<sup>143</sup> Berikut kutipan wawancara dengan pendamping PKH Desa Soko:

*“Ada beberapa nama warga Desa Soko yang menurut saya memang warga kurang mampu. Contohnya Mbah Saprok. Kalau Mbah Saprok itu kan tinggal sendirian, rumahnya sangat tidak layak. Harusnya dapat PKH. Tapi, karena kuota pemerintah untuk Desa Soko yang terbatas dan data nya tidak ada nama Mbah Saprok, kami tidak bisa memasukkan KPM. Karena kami bisa mengeluarkan KPM, tapi tidak bisa memasukkan. Kalau KPM mampu bisa kami keluarkan dari KPM. Tapi Mbah Saprok dapat bantuan lain.”<sup>144</sup>*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Misnamar. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Menurut saya sih ada beberapa yang layak mendapatkan PKH mbak. Contohnya Mbah Rati. Mbah Rati itu hidup sendirian. Tidak mempunyai keluarga. Sudah tua juga. Tapi kayake Mbah Rati itu tidak punya KTP. Katanya, kalau tidak punya KTP dan KK tidak bisa mendapatkan bantuan mbak. Kayaknya dulu sempat mau dibuatkan, tapi Mbah Rati yang tidak mau. Sepertinya begitu.”<sup>145</sup>*

Beberapa nama warga yang layak untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan ini adalah:

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

**Tabel 4.4**  
**Nama warga yang layak mendapat PKH**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
1.	Rati	Soko
2.	Rebon	Soko
3.	Saprok	Soko
4.	Jariyah	Soko
5.	Suwito	Soko

Sumber: Wawancara dengan KPM dan Pendamping PKH

Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan secara objektif. Karena tidak ada campur tangan dari pemerintah desa untuk memasukkan masyarakat yang sudah mampu untuk menjadi anggota PKH. Data Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari data BDT dari pemerintah. Kemudian dilakukan validasi di desa dengan cara menyebarkan undangan untuk mengumpulkan KPM di balai desa yang disebut dengan pertemuan awal. Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah warga tersebut benar-benar miskin dan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah yaitu ibu hamil, anak sekolah, lansia dan disabilitas.<sup>146</sup>

Selain sasaran yang sudah tepat, indikator tepat jumlah pun dalam PKH Desa Soko berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara, KPM Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko mengatakan ketepatan jumlah yang diberikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indikator tepat guna pun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk kegunaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

disabilitas. Begitupun dengan indikator tepat waktu yang berjalan dengan baik. Waktu pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Pendamping PKH mengatakan bahwa waktu pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sangat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contohnya pada Bulan November ini pemerintah tepat waktu dalam membagikan Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>147</sup>

Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah memenuhi 4 (empat) indikator tercapainya Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, memang dapat dikatakan jika Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko belum merata. Karena masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat dari program ini.

#### **B. Analisis Program Keluarga Harapan Untuk (PKH) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan; (2) peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; (3) perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>148</sup> Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, h. 27.

Sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya Program Keluarga Harapan (PKH), maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya.<sup>149</sup> Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.<sup>150</sup> Dari kebutuhan dasar tersebut, tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

##### a. Tingkat Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.<sup>151</sup> Dari hasil wawancara dengan Dina Sri Utami menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya melihat bahwa seluruh penerima PKH Desa Soko sudah terpenuhi tingkat kebutuhan pangannya. Karena setiap pertemuan kan saya membuka sesi tanya jawab juga dan juga sesi apakah ada permasalahan yang di hadapi oleh KPM. Namun, selama ini saya tidak terlalu melihat ada kendala dalam masalah pangannya. Kalau untuk makan dua kali sehari KPM sudah bisa makan dua kali sehari. Dengan adanya Program Program Keluarga Harapan (PKH), saya rasa masyarakat merasa terbantu dan menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Misalnya, lansia menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencukupi kebutuhan*

---

<sup>149</sup> <https://www.google.com/search?q=kebutuhan+dasar+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 21.29.

<sup>150</sup> Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, h. 27.

<sup>151</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, h. 111.

*makannya, misalnya digunakan untuk membeli lauk yang lebih bergizi daripada sebelumnya. Kalau ibu hamil ya untuk mencukupi gizi ibu hamil dan bayinya. Kalau anak sekolah ya untuk membeli susu. Sehingga kondisi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko menjadi terpenuhi dari segi kebutuhan pangannya.”<sup>152</sup>*

Dari hasil wawancara di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah tepat sasaran, tepat jumlah. Tepat guna serta tepat dalam pendistribusiannya kepada masyarakat dan cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dijadikan sebagai penjamin keseluruhan kebutuhan pokok keluarga karena dana PKH hanya bisa membantu mengurangi beban kebutuhan pokok keluarga dan membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

#### b. Tingkat Perumahan

Rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.<sup>153</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, KPM sudah memiliki hak atas kepemilikan rumah masing-masing. Namun, beberapa KPM masih ada yang belum memiliki hak atas kepemilikan rumah misalnya mereka masih tinggal bersama orang tua mereka. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Rumah tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai seseorang miskin atau tidak. Karena kondisi seseorang setiap tahunnya pasti berubah. Mungkin saja ada yang rumahnya bagus tapi kondisi sekarang tidak mempunyai uang. Karena mungkin dulu prioritas utama adalah rumah. Namun, menurut saya penerima PKH Desa Soko merupakan warga yang memang layak mendapatkan PKH dan rumahnya juga biasa saja. Contohnya saya sendiri malah tidak mempunyai rumah. Saya masih ikut dengan orang tua.”<sup>154</sup>*

---

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>153</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati pada tanggal 1 November 2016 pukul 18.16.

Menurut Dina Sri Utami, jika dilihat dari kondisi rumah KPM, KPM Desa Soko merupakan KPM yang memang berhak untuk mendapatkan PKH. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Rumah KPM desa Soko alas rumahnya masih banyak yang tanah, tidak semen maupun berkeramik. Terkadang genteng pun masih belum permanen. Dan juga dinding yang masih terbuat dari kayu dan rumahnya belum memiliki pondasi. Jadi menurut saya tingkat perumahan KPM di Desa Soko ada beberapa yang memang belum dikatakan layak huni. Saya mengetahui kondisi tersebut karena saya mendatangi rumah KPM setiap bulannya. Karena pertemuan KPM di rumah para anggota KPM.”<sup>155</sup>*

Berdasarkan data pada lapangan, bahwa KPM Desa Soko memang keluarga yang dikatakan keluarga tidak mampu. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tidak begitu memberikan dampak secara signifikan terhadap tingkat perumahan masyarakat penerima. Karena Program Keluarga Harapan (PKH) hanya bersifat bantuan dana yang meringankan kebutuhan rumah tangga miskin sehingga mereka mampu menekan jumlah pengeluaran akan kebutuhan pokok dalam keluarganya.

#### c. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>156</sup> Kesehatan merupakan kebutuhan asasi yang harus diperoleh manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk dalam masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup yang terpenting.<sup>157</sup> Kesehatan masyarakat Desa Soko dapat terlihat dalam penanganan kesehatannya. Desa Soko sering mengadakan pelayanan kesehatan seperti posyandu, program KB, dan sebagainya yang terjadwal setiap bulannya sehingga bayi dan orang

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Dina Sri Utami ( Pendamping PKH Desa Soko) tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.07.

<sup>156</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#Kesehatan\\_Menurut\\_Undang-Undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#Kesehatan_Menurut_Undang-Undang) diakses tanggal 26 November 2018 pukul 19:23.

<sup>157</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, h. 129.

tua tidak khawatir akan kesehatannya karena rutin ikut serta dalam pelayanan dibidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Misnamar, salah seorang KPM mengatakan bahwa masyarakat sudah peduli akan kondisi kesehatannya, sehingga ketika diserang rasa sakit langsung menuju ke tempat pemeriksaan. Desa Soko memiliki 1 bidan desa dan 1 bidan yang membuka praktek di desa. Jikalau warga ingin memeriksakan diri bisa datang ke puskesmas di Kecamatan Gabus.<sup>158</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap tingkat kesehatan KPM, karena di Desa Soko banyaknya masyarakat KPM belum mampu sehingga segala kebutuhan bagi keluarganya belum tercukupi dengan baik. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), KPM mampu memenuhi kebutuhan akan pangannya dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena apabila manusia terpenuhi kebutuhan pangannya, secara langsung kesehatannya juga terjaga. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

## 2. Tingkat Kehidupan

Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan, yang bertujuan mampu bersaing dimasanya dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak.<sup>159</sup> Dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Dari kedua tingkat kehidupan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil usaha oleh kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misnamar tanggal 2 November 2018 pukul 16.34.

<sup>159</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&>

anggota rumah tangga.<sup>160</sup> Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Soko berpengaruh terhadap suatu pekerjaan masyarakat, pada umumnya sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Soko adalah di bidang pertanian.<sup>161</sup> Pendapatan masyarakat PKH di desa Soko sudah dikatakan layak dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga meskipun tidak memiliki pendapatan yang tetap, akan tetapi masih berada pada batas minimal penghasilan masyarakat yaitu Rp. 500.000/bulan.<sup>162</sup>

Wawancara dengan Dina Sri Utami menyatakan bahwa masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagian besar belum dinyatakan mampu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin karena PKH merupakan dana yang cukup membantu untuk meringankan kebutuhan rumah tangga miskin sehingga mereka mampu menekan jumlah pengeluaran akan kebutuhan pokok dalam keluarga KPM.”*

Berdasarkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah terlaksana dengan baik sehingga cukup memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Dengan adanya dana PKH yang diberikan, maka ada tambahan dana untuk pemasukan KPM.

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

---

<sup>160</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatan\\_rumah\\_tangga.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatan_rumah_tangga.aspx) diakses tanggal 26 November 2018 pukul 20:16.

<sup>161</sup> Data dari Desa Soko

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan perangkat desa Soko (Yuli Nur Cholifah) tanggal 3 November 2018 pukul 14.33.



dan negara.<sup>163</sup> Tingkat pendidikan masyarakat Desa Soko ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan ke jenjang SMA dan Perguruan Tinggi.<sup>164</sup>

Wawancara dengan salah satu KPM Desa Soko, Ibu Uyun Rosyida menyatakan bahwa ada dampak PKH terhadap pendidikan. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Dampak adanya Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat pendidikan di Desa Soko cukup bermanfaat, karena Program Keluarga Harapan (PKH) membantu KPM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya untuk membeli peralatan sekolah berupa tas, sepatu, buku hingga bisa membayar biaya sekolah dengan menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH).”<sup>165</sup>*

Berdasarkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah terlaksana dengan baik dalam hal pendidikan. Dengan adanya dana PKH yang diberikan, maka ada tambahan dana untuk pendidikan KPM.

Berdasarkan pada kondisi di atas diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan masyarakat sebelum maupun sesudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) cukup memiliki perubahan yang berdampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya. Sehingga dapat dikatakan Program Keluarga Harapan (PKH) cukup membantu untuk mensejahterakan masyarakat miskin Desa Soko dalam bidang pendapatan dan pendidikan.

3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdasarkan data pada lapangan, KPM tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian bagi keluarga mereka

---

<sup>163</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>164</sup> Data dari Desa Soko

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Uyun Rosida tanggal 1 November 2018 pukul 16.02.

yang lebih baik. Menurut Ibu Sulastrri mengatakan bahwa sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan mereka sekarang ini, karena kemampuan yang mereka miliki pun sangat terbatas. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya merasa kesulitan mbak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Apalagi saya hanya lulusan SD dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Namun dengan adanya PKH ini kan saya jadi terbantu.”<sup>166</sup>*

Berdasarkan hal ini bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan dampak terhadap perekonomian KPM, karena Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan yang berbentuk dana bagi rumah tangga miskin.

### **C. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Soko dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, dogma, norma, dan ajaran islam (variabel keimanan) sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan.<sup>167</sup> Dalam implementasi PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Soko perspektif Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam yaitu:

#### 1) Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.<sup>168</sup>

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko termasuk sudah tepat sasaran dari pemberian manfaat dana bantuan, namun karena banyaknya masyarakat miskin Desa Soko sehingga masih ada yang

---

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastrri tanggal 1 November 2018 pukul 10.20.

<sup>167</sup> Muhamad Takhim, Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, h. 11  
<http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>.

<sup>168</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, h. 63.

belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. Sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut belum dapat dikatakan merata. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat/rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum memenuhi prinsip keadilan.

## 2) Pertanggungjawaban

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.<sup>169</sup>

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko seluruh pihak sudah bertanggungjawab untuk mewujudkan kemaslahatan program ini dan dalam hal ini seluruh pihak sudah amanah dalam menjalankan tugasnya, karena Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diberikan kepada orang yang tepat, tepat waktu, tepat guna serta tepat jumlah. Jadi, indikator tanggung jawab dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko sudah terealisasi dengan baik.

## 3) *Tafakul* (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang.<sup>170</sup> Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung

---

<sup>169</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, h. 63.

<sup>170</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, h. 63.

jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip “*hak untuk hidup*”.<sup>171</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam sudah dapat dikatakan tanggung jawab, karena semua pihak yang sudah mengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik.

---

<sup>171</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, h. 9

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati) adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Program Keluarga Harapan di Desa Soko dari tahun 2013-2017 sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata, karena masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Desa Soko dan juga banyaknya jumlah warga miskin masyarakat Desa Soko.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko cukup meningkatkan kesejahteraan KPM. Dari 3 indikator kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar
- b. Tingkat Kehidupan
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdasarkan 3 indikator kesejahteraan masyarakat di atas, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mampu memenuhi seluruh indikator tersebut. Oleh sebab itu, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dapat meningkatkan kesejahteraan KPM Desa Soko.

### 3. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Soko menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu:

- a. Keadilan
- b. Tanggung Jawab
- c. *Tafakul* (Jaminan Sosial)

Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial). Sedangkan, prinsip keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Adanya penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya Desa Soko dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini peneliti buat. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca masih dalam kategori jauh dalam kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi kekurangan yang ada. Untuk yang terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. Agar karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti dan umumnya semua pembaca sekaligus pemerhati ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016*, (Online) tersedia di: [https://www.bps.go.id/website/brs\\_ind/brsInd-20160718115446.pdf](https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160718115446.pdf), (diakses pada, Senin, 2 Juli 2018).

Bagir, Muhammad, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Bandung : Mizan, 1985.

Beik, Irvan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009.

Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017.

Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hadi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2015.

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatan\\_rumah\\_tangga.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatan_rumah_tangga.aspx) diakses tanggal 26 November 2018 pukul 20:16.

<https://bpbd.patikab.go.id/Profil-Daerah> (diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 09.37 WIB).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#Kesehatan\\_Menurut\\_Undang-Undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#Kesehatan_Menurut_Undang-Undang) diakses tanggal 26 November 2018 pukul 19:23.

<https://id.climate-data.org/location/26742>(diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 09.28 WIB).

Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.

Ismail, Asep Usman, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang : Lentera Hati, 2012.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Khomsan, Ali dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.



Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Tim FEBI IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014.

Todaro, Michael P. dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wargadinata, Wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang :UIN Maliki Press, 2011.

## **Jurnal**

Akhmad Rozi, Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut, FOCUS, Universitas Lambung Mangkurat, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011, h. 78.

Dedy Utomo, Abdul Hakim dan Heru Ribawanto, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, h. 34.

Dyah Ayu Virgoreta, dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 12, Universitas Brawijaya, 2014, h. 4.

Kadek Dina Indriani, Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017, h. 9.

Muhamad Takhim, Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, h. 11 <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>.

Muheramtohad S, *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*, Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 2018, h. 21-22, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/283>.

Yudid B.S.Tlonaen dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 3, Nomor 1, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2014, h. 36.

Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158 <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017), h. 239 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

Muhammad Akbar, Abdurahman, Sandy Rizki Febria, Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, h.747  
[http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan\\_syariah/article/viewFile/10709/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/viewFile/10709/pdf).

### **Skripsi**

Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)” *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

1. Menurut anda, apakah PKH (Program Keluarga Harapan) sudah merata untuk masyarakat miskin di Desa Soko?
2. Apakah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Soko sudah sesuai dengan kriteria yang sudah pemerintah tetapkan?
3. Apakah dari pemerintah akan ada penambahan kuota PKH (Program Keluarga Harapan) untuk Desa Soko khususnya?
4. Apakah menurut anda, PKH (Program Keluarga Harapan) sudah mensejahterakan masyarakat miskin Desa Soko?
5. Bagaimana peran PKH (Program Keluarga Harapan) dalam mensejahterakan masyarakat?
6. Apakah anda selaku pendamping PKH Desa Soko selalu melakukan pendampingan dengan baik?
7. Apakah anda selaku pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan peserta PKH Desa Soko dengan rutin?
8. Apakah penerima PKH turut menghadiri pertemuan dengan rutin?
9. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)? Jika ada, kendala apa yang anda hadapi?
10. Apa saran anda terhadap pemerintah terhadap PKH (Program Keluarga Harapan) yang sudah anda dampingi selama ini?
11. Apakah menurut anda, PKH harus dilanjutkan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH)

Nama :

Alamat :

1. Dari manakah ibu mendapat informasi bahwa ibu sebagai penerima PKH?
2. Apakah pendamping PKH selalu mendampingi dengan baik?
3. Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan rutin?
4. Apakah ibu turut menghadiri pertemuan dengan rutin?
5. Apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh petugas/pemerintah desa?
6. Apakah setelah adanya sosialisasi ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak-hak ibu sebagai peserta PKH?
7. Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan memberatkan ibu sebagai peserta PKH?
8. Apakah ibu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan?
9. Apakah tahap pencairan dana di cairkan tepat waktu?
10. Apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan?
11. Apakah ada pemotongan jumlah dana dari pihak tertentu?
12. Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat?
13. Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat?
14. Apakah setelah menjadi anggota PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat terpenuhi?
15. Apakah dengan adanya PKH kualitas kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat meningkat?

16. Apakah ibu termasuk dalam keluarga dengan status ekonomi menengah kebawah?
17. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH?
18. Menurut ibu, apakah ibu layak mendapat bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan?
19. Berdasarkan pandangan ibu, apakah PKH sudah merata untuk masyarakat Desa Soko?
20. Berdasarkan pandangan ibu, apakah peserta PKH Desa Soko sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah?
21. Apakah ada warga lain yang layak untuk mendapatkan PKH di Desa Soko?
22. Apakah PKH telah mensejahterakan keluarga ibu? Kesejahteraan apa yang sudah dirasakan sebagai anggota PKH?
23. Apakah PKH perlu dilanjutkan?

Lampiran 2

**DOKUMENTASI**



**WAWANCARA DENGAN IBU LILIK  
SUDARWATI (KPM DESA SOKO)**

**WAWANCARA DENGAN IBU MISNAMAR (KPM DESA SOKO)**



**WAWANCARA DENGAN IBU SULASTRI (KPM DESA SOKO)**



**WAWANCARA DENGAN DINA SRI UTAMI (PENDAMPING PKH DESA SOKO)**



**P2K2  
DESA  
SOKO  
DI  
RUMAH  
BAPAK  
DAMAN**



**WAWANCARA DAN DOKUMENTASI PENYERAHAN DATA DI DESA SOKO**





## LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
website : febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-2477/Un.10.5/D1/TL.00/08/2018 29 Agustus 2018  
Lampiran : --  
Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

Yth.  
Kepala Dinas Sosial Kab. Pati  
Jl. Raya Gabus Kab. Pati  
Di Tempat.  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

Nama : Eny Kusumawati  
NIM/Program/Smt : 1405026034 / S.1 / IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Ds. Soko Rt.03 Rw.01 Kec. Gabus Kab. Pati  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus)  
Waktu Research : 29 Agustus 2018 sampai selesai



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Pati Kode Pos : 59163  
Telepon : (0295) 381351 http://www.bappeda.patikab.go.id  
Fax. : (0295) 385735 e-mail:bappeda@patikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: 070 /282/ IX / 2018

- I. DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MENUNJUK SURAT DARI : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN WALISONGO SMG  
Nomor : B-2477/Un. 10.5/D1/TL.00/08/2018  
Tanggal : 29 Agustus 2018  
Perihal : Surat Pengantar Izin Pra Riset
- III. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
- Nama : ENY KUSUMAWATI
  - Alamat : Ds Soko Kec Gabus Kab. Pati
  - Pekerjaan : Mahasiswa bermaksud melaksanakan : Penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA SOKO KECAMATAN GABUS)"
  - Penanggung Jawab : Ali Murtadho
  - Lokasi : Dinas Sosial
- IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat
  - Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
  - Setelah selesai Pelaksanaan Penelitian wajib menyerahkan hasil penelitian berupa 1 eksemplar buku hasil penelitian beserta file dalam bentuk CD Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pati.
- V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal 13 September 2018 s.d. 13 Desember 2018.

Dikeluarkan di : P A T I  
Pada Tanggal : 13 September 2018

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI  
Sekretaris,

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Bupati Pati (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Sosial Kab. Pati;
- .....



AGUS SURYANTO, SH

Rembina Tingkat I

NIP. 19620815 198912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS SOSIAL**

Jalan : Ki Juru Mertani Pati Telp/Fax : (0295) 381642  
Kode Pos : 59117 Email : dinsos@patikab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 4092 .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. SUBAWI,MM  
NIP : 19610907 1989013 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV-c  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab.Pati

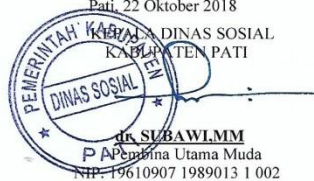
Menerangkan bahwa :

Nama : ENY KUSUMAWATI  
Alamat : Ds.Soko Kec.Gabus Kab.Pati  
Pekerjaan : Mahasiswi

melaksanakan penelitian dengan judul proposal : “ ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( STUDI KASUS DESA SOKO KECAMATAN GABUS )” dari tanggal 13 September 2018 s/d 13 Desember 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pati, 22 Oktober 2018



TEMBUSAN  
1. ARSIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
website : febl.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-3030/Un.10.5/D1/TL.00/10/2018

24 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Soko Kec. Gabus  
Ds. Soko Kec. Gabus Kab. Pati

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi Untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Eny Kusumawati  
NIM/Program/Smt : 1405026034 / S.1 / IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Ds. Soko Rt.03 Rw.01 Kec. Gabus Kab. Pati  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)  
Waktu Research : 24 Oktober 2018 sampai selesai  
Lokasi Penelitian : Desa Soko Kec. Gabus Kab. Pati

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,  
Dekan Bidang Akademik  
Institusi Kelembagaan

Tembusan :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang  
(sebagai laporan)

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Eny Kusumawati
2. Tempat & Tgl Lahir : Pati, 16 September 1996
3. Alamat Rumah :Desa Soko RT/RW:03/01  
Kec. Gabus Kab. Pati
4. No. HP : 082325921635
5. E-mail :[kusumaeny180@gmail.com](mailto:kusumaeny180@gmail.com)
6. Media Sosial : FB : Eny Kusuma



### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Pertiwi Soko, lulus tahun 2002
  - b. SDN Soko, lulus tahun 2008
  - c. SMPN 01 Winong, lulus tahun 2011
  - d. MA Roudlotusysyubban, lulus tahun 2014
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Brilliant English Course di Pare, Kediri Jawa Timur
  - b. ELFAST di Pare, Kediri Jawa Timur

Semarang, 3 Desember 2018

Eny Kusumawati  
1405026034